Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep

Community Participation in Village Develoment Planning Deliberations in Gedungan Village, Batuan Distric, Sumenep Regency

Oleh :

Thufail Aqil AM
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja
E-mail : thufailaqil0202@gmail.com

Abstrak

Community participation as development input is expected to increase efforts to improve conditions and living standards of rural communities. Between the participation of the village community and the ability of the village community to develop independently. The purpose of this research is to find out how the community participates in attending village development planning meetings. This research is a qualitative research. While the subjects in this study were determined based on purposive sampling techniques, and the data collection techniques the authors used in this study were observation, interview and documentation techniques, to find out how community participation in participating in village development planning deliberations in this building village the authors used the theory of community participation including attendance at meetings, discussions, contributions of ideas and responses or rejection of the programs offered. From the results of the study it was concluded that in general community participation in village development planning meetings in the village of Gedungan in 2022, not all meeting participants had a special invitation to attend. There were several youth leaders who attended without an official invitation. However, the percentage of participants in Musrengbandes is very good because it reaches 80%. And community participation in contributing ideas in village development planning meetings is still low. The community's obstacles to participating in musrenbang activities are the lack of socialization of village musrenbang activities and the lack of public trust in the village head's leadership and the community feeling represented by the presence of the RT and RW heads. This is due to the lack of public awareness of the importance of development in the village.
Keywords: community participation, musrenbangdes

Abstrak

Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa. Diantara partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri. tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling, dan teknik pengumpulan data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa gedungan ini penulis menggunakan teori partisipasi masyarakat diantaranya kehdiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pikiran dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa gedungan tahun 2022 tidak semua peserta rapat

memiliki undangan khusus untuk menghadiri. Ada beberapa dari kalangan tokoh pemuda yang menghadiri tanpa adanya undangan secara resmi. Namun, secara presentase kehadiran partisipan dalam Musrengbandes adalah baik karena mencapai 80% hal ini didasari oleh daftar hadir waktu pelaksanaan musrenbangdes. Dan partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa masih rendah. hambatan masyarakat untuk mengikuti kegiatan musrenbang adalah kurang sosialisasi akan adanya kegiatan musrenbangdesa serta kurangnya kepercayaan masyarakat akan kepemimpinan kepala desa serta masyarakat merasa terwakili akan kehadian ketua RT maupun RW. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di desa.
Kata kunci : partisipasi masyarakat, musrenbangdes

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan kepentingan masyarakat tentunya harus memiliki seperangkat peraturan dan kesepakatan bersama. Peraturan dan kesepakatan bersama dapat terbentuk melalui musyawarah. Musyawarah dalam menentukan arah dan program desa dikenal dengan sebutan MUSRENBANGDES. Musrenbangdes singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang merupakan sasaran pemerintah di seluruh tingkat untuk menghimpun aspirasi pembangunan pada semua bidang kehidupan masyarakat, baik pembangunan material (berwujud) maupun in-material (tidak berwujud). Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya yang dilaksanakan secara partisipatif untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa tersebut.

Musrenbangdes sebagai sarana konsultasi serta pemberian masukan dari masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan di tingkat desa merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi masyarakat. Secara khusus dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat dalam perumusan program-program pembangunan desa, hanya saja pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kelemahan dalam hasil-hasil pembangunan, misalnya program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, kenyataannya masyarakat di Desa Gedungan banyak yang tidak ikut berpartisipasi dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa karena masyarakat yang di undang kebanyakan para masyarakat yang sudah tidak mempunyai pemikiran lebih dalam menyampaikan permasalahan dan kebutuhan dalam membangun desanya. Terkesan hanya formalitas, karena yang hadir adalah yang berada dalam lingkup kekuasaan pemerintah desa. Keikutsertaan mereka yang di undang pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa hanya sebatas menghadiri atau menyimak saja, tidak menyampaikan pendapat atau masukan untuk pembangunan desa kedepannya. Pembahasan mengenai perencanaan pembangunan sepenuhnya hanya milik pemerintah desa sendiri.

Selain itu, program yang direncanakan atau ditetapkan saat Musrenangdes sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan banyak yang tidak terlaksana. Saat peneliti melakukan observasi awal peneliti mendapatkan informasi dari masyarakat desa bahwa, aparat desa tidak memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau masukan dalam pelaksanaan Musrenbangdes, dikarenakan adanya perbedaan pandangan politik dengan pejabat pemerintah desa.

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Beberapa faktor lain yang membuat partisipasi masyarakat kurang geliat dan efektif, diantaranya adalah topik pembahasan Musrengbandes tidak sesuai dengan kehendak sebagian besar masyarakat. Misalnya, terlalu banyak pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur yang masih bagus dan mengesampingkan pembangunan sumber daya manusia. Padahal pembangunan sumber daya manusia tidak kalah penting untuk dibahas dan dibuat program agar bisa mendukung kemajuan desa.

2. TINJAUAN TEORITIS

Penelitian yang dilakuakan (Afda Liza Fitri, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Pembanguna (MUSRENBANG) di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tergolong masih sedang, hal ini terbukti karena daalam pelaksanaan Musrenbang tidak ada inisiatif dari masyarakat itu sendiri untuk mengikuti kegiatan Musrenbang. Persamaan dari penelitian ini yaitu menganalisis partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes, sedangkan perbedaannya terletak di fokus dan lokus penelitiannya.

Soip (2020) dalam penelitiannya yang berjudul partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata (Studi Desa Wonokerto, Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gisting Bawah dalam pengembangan objek wisata Dam Margotirto pada perencanaan berada pada tingkat yang tinggi dimana masyarakat menghadiri rapat, musyawarah untuk setiap rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan Dam Margotirto. Kemudian pada tahap pelaksanaan berada tingkat yang sedang, pada tahap pemanfaatan hasil berada pada tingkatan yang rendah dan pada tahap evaluasi berada pada tingkatan yang tinggi. Maka dapat dikatakan masyarakat Desa Wonokerto Bawah turut serta dalam berpartisipasi.

Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry dalam Anggara (2015 : 46-47) memberi batasan bahwa administrasi publik adalah kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, bertujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Sedangkan menurut Soesilo Zauhar dalam Anggara (2015: 47), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama yang berlaku dalam organisasi publik dalam rangka memberikan pelayanan publik. Tujuan administrasi publik bersifat nonprofit untuk kepentingan masyarakat.

Partisipasi Masayarakat

Menurut (Ach. Wazir Ws, et al., 1999) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Menurut Dwiningrum, (2011: 61) Masyarakat berpartisipasi dengan:

1) Kehadiran dalam rapat, yaitu Ketersediaan masyarakat untuk datang menghadiri rapat atau musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa
2) Diskusi, adalah bagaimana masyarakat dalam forum Rapat tersebut ikut menyalurkan pendapat dan membahasnya bersama para pemimpin desa untuk Tercapainya keinginan masyarakat untuk desa. Dengan bersama-sama membahas rencana Pemerintah dan keinginan masyarakat
3) Sumbangan pikiran, yakni ide-ide atau saran apa yang Diinginkan masyarakat

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

untuk desa dan untuk kepentingan desa

4) Tanggapan atau penolakan Terhadap program yang ditawarkan, yaitu masyarakat diharapkan lebih aktif lagi menanggapi program-Program perencanaan pembangunan yang ditawarkan tidak hanya pasrah terhadap keputusan-keputusan Pemerintah desa saja.

Menurut Huraerah (2011:114), tingkatan partisipasi ada empat sebagai berikut.

1) Berbagi Informasi bersama (sosialisasi) Pemerintah hanya menyebarluaskan informasi tentang program yang akan direncanakan atau sekedar memberikan informasi mengenai keputusan yang dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut
2) Konsultasi/mendapat umpan balik Pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan
3) Kolaborasi/pembuatan keputusan bersamaMasyarakat bukan sebagai penggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat memengaruhi hasil/keputusan
4) Pemberdayaan/kendali Masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991:154-155) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Perencanaan

Menurut Iwan Nugroho Dan Rokhmin Dahari (2004:8) bahwa perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau tekhnik yang didasari kaidah-kaidah ilmiah kedalam praksis dalam kepentingan orang banyak atau publik. Di dalam perencanaan, oleh karena berlandasan kaidah ilmiah, senantiasa siizinkan terjadi perubahan-perubahan dalam rangka menuju atau mendekati ide (full idea) yang lebih baik. Adapun sasarannya dipengaruhi oleh nilai nilai yang dianut masyarakat. Menurut Louise T. Hani Handoko (2005) bahwa perencanaan (planning) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penetapan strategi tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, prosedur, metode, program, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, fokus penelitian ini menggunakan teori dwiningrum(2011:61) yang terdiri dari Kehadiran dalam rapat, Diskusi, Sumbangan Pikiran dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. sumberdata yang digunakan yaitu : data primer dan data skunder. Instrumen penelitian terdiri : informan kunci yaitu masyakan khusu, informan utama yaitu badan permusyawaratan desa dan informan kunci yaitu kepala desa gedungan. Teknik pengumpulan data yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik penyajian data : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran dalam Rapat

Kehadiran partisipan yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta aparatur pemerintahan desa sangatlah kompak dan berjalan dengan lancar. Hal ini ditegaskan dalam daftar hadir rapat yang berjumlah 40 orang dari 50 orang yang diundang. Tentunya, ini merupakan sebuah hal positif dalam merajut pembangunan desa yang lebih baik dan unggul. Umumnya, para partisipan yang hadir dalam rapat memiliki ide atau gagasan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini dibuktikan dari beberapa partisipan yang sudah siap dengan saran dan kritik sebelum acara Musrengbandes berlangsung. Bahkan, peserta Musrengbandes dari kalangan tokoh yang berhalangan hadir turut mewakilkan dirinya beserta gagasannya untuk kemudian di sampaikan di acara inti Musrengbandes melalui perwakilannya.

Namun, dalam kegiatan Musrengbandes tidak semua peserta rapat memiliki undangan khusus untuk menghadiri. Ada beberapa dari kalangan tokoh pemuda yang menghadiri tanpa adanya undangan secara resmi. Mereka hanya memperoleh informasi adanya Musrengbandes dari ajakan temannya yang kebetulan di undang dan di suruh mengajak anggota lainnya. Hal ini tentu menjadi perhatian untuk senantiasa menyiapkan undangan secara maksimal oleh pihak pemerintah desa agar kejadian ini tidak terulang kembali. Peserta yang hadir dalam rapat Musrengbandes yang mencapai 80 % dari undangan yang disebar sudah menjadi prestasi tersendiri bagi pemerintah desa Gedungan, Batuan ini. Banyaknya peserta yang hadir menandakan bahwa masyarakat cukup antusias untuk berbagi waktu, ide, dan gagasan demi kemajuan desanya.

Diskusi

Diskusi merupakan sarana bertukar pikiran dan pandangan yang melibatkan interaksi antar personal dengan lainnya untuk menemukan solusi bersama. Diskusi sendiri merupakan aktivitas umum dalam sebuah tatanan sosial, baik yang dikemas dengan acara formal ataupun non-formal. Tujuan diskusi adalah pemecahan masalah. Dengan diskusi, seseorang bisa memahami dan membongkar permasalahan atas topik yang dibahas. Proses diskusi yang berlangsung mengundang pro dan kontra dalam proses pengambilan keputusan dalam acara Musrengbandes. Hal ini dibilang cukup wajar karena setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Diskusi hadir sebagai sarana untuk interaksi pengambilan keputusan dalam Musrengbandes untuk kemudian hasilnya menjadi pertimbangan untuk dimasukkan dalam RKPDes.

Diskusi yang berlangsung cukup aktif, terutama dengan tema topik yang aktual dengan apa yang terjadi di desa. Mereka para peserta Musrengbandes beradu pendapat dan pandangan mengenai ide dan gagasan atas topik yang diangkat oleh narasumber. Namun, ada juga yang tak acuh bilamana topik pembahasan yang disampaikan narasumber sudah mereka lakukan secara gotong-royong bersama lainnya dan keputusan mengenai ide dan gagasan menjadi hak prerogatif Kepala Desa untuk menjalankan pemerintahannya.

Sumbangan Pikiran

Sumbangan pikiran partisipan masyarakat dalam pengambilan keutusan dalam kegiatan musrenbangdes adalah masyarakat yang terlibat aktif dalam memberikan ide-ide atau pemikiran dalam proses yang berlangsung. Sumbangan pemikiran dari masyarakat merupan indikator utama dalam pengambilan keputusan dimana masyarakat juga dilibatkan dan diberikan akses informasi yang terbuka luas sehingga hasil keputusan dapat diterima oleh masyarakat umum. Sumbangan pemikiran merupakan sumbangsih yang disampaikan dan diberikan oleh setiap partisipan yang hadir dalam acara Musrengbandes.

Maka dari itu, sumbangan pemikiran masyarakat yang hadir sebagai partisipan berasal dari latar belakang permasalahan yang berbeda, yang harus mereka

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

diskusikan agar sumbangan pemikirannya dapat menjadi pertimbangan unruk dimasukkan dalam RKPDes selanjutnya. Dari semua partisipan 60 % sumbangannya diterima dan 40 % ditolak. Hal ini di tunjukkan dari hasil wawancara dari informan kunci dan informan utama. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh pendapat masyarakat yang hadir dalam Musrengbandes direalisasikan dalam bentuk program yang di rencanakan melalui RKPDes.

Tanggapan atau Penolakan Terhadap Program yang Ditawarkan

Musrengbandes merupakan sebuah kegiatan inti tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa dalam menentukan arah pembangunan desa melaui musyawarah bersama. Tentunya, dalam musyawarah terdapat sebuah masukan dan kritikan terhadap program yang akan dijalankan dan sudah dijalankan. Namun, pada acara forum Musrengbandes tanggapan ataupun penolakan merupakan sebuah hal yang harus ada karena implikasi dari permasalahan yang sedang di kaji dan di diskusikan secara bersama dengan perwakilan masyarakat. Tanggapan ataupun penolakan dalam proses Musrengbandes disasarkan kepada program yang ditawarkan oleh pemerintah desa. Program yang ditawarkan pemerintah desa menjadi sebuah acuan masyarakat dalam mendungkung dengan tanggapan positif ataupun penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan ini, tanggapan ataupun penolakan dalam proses Musrengbandes merupakan pertimbangan masyarakat dalam terselenggaranya pembangunan desa.

Dalam hal ini, peneliti menemukan hampir banyak respon positif terhadap proses kegiatan Musrengbandes yang tersedia di rapat tahunan, berupa rapat anggaran dan skala prioritas pembangunan desa. Tanggapan positif ini didasarkan kepada jawaban dari para partisipan yang hadir dalam kegiatan Musrengbandes. Ada banyak partisipan yang memberikan tanggapan positif atas terselenggaranya kegiatan Musrengbandes ini. Hal ini menunjukkan bahwa proses Musrengbandes ini berjalan dengan sukses dengan adanya beberapa tanggapan positif. Namun, dengan banyaknya tanggapan positif yang dilontarkan oleh responden yang terdiri dari lapisan elemen masyarakat yang majemuk, ada pula penolakan yang di suarakan oleh masyarakat dikarenakan beberapa hal. Salah satunya adalah aspirasi yang telah diserap menjadi program pembangunan desa dan akan dimasukkan ke RKPDes, tidak melampirkan estimasi anggaran yang transparan. Padahal transparansi anggaran sangatlah penting, sebab masyarakat juga bisa ikut tahu planning estimasi anggaran pada setiap program secara rinci itu berapa. Bukan hanya disuguhi anggaran secara global yang menimbulkan persepsi liar di kalangan masyarakat.

5. PENTUP

Kehadiran partisipan yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta aparatur pemerintahan desa sangatlah kompak dan berjalan dengan lancar. Namun, secara presentase kehadiran partisipan dalam Musrengbandes sangat baik. Diskusi dalam musrenbangdes terlaksana dengan baik, sedangkan sumbangan pemikiran dari masyarakat sudah mencapai 60%. Program yang ditawarkan pemerintah desa menjadi sebuah acuan masyarakat dalam mendungkung dengan tanggapan positif ataupun penolakan terhadap program yang ditawarkan. Banyak respon positif terhadap proses kegiatan Musrengbandes yang tersedia di rapat tahunan, berupa rapat anggaran dan skala prioritas pembangunan desa. Namun ada juga respon berupa penolakan, yaitu aspirasi yang telah diserap menjadi program pembangunan desa dan akan dimasukkan ke RKPDes, tidak melampirkan estimasi anggaran yang transparan. Saran dari peneliti , alangkah baiknya lebih ditingkatkan lagi melalui motivasi dan kreasi agar masyarakat hadir 100 % sebagai wujud dari terealisasinya rapat

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

yang sangat penting demi pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory And Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Conyers, Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia ketiga. Yogyakarta: UGM Press.

Draha, Taliziduhu. (1987). Pengembangan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Bina Aksara

Dwiningrum, S.I.A. (2011:61) Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Pustaka pelaja.

Hamijoyo, (2007). Partisipasi dalam pembangunan,Jakarta: Depdikbud RI, Hal. 27

Retno Suno Astuti, Hardi Warsono, Abd. Rachim. (2020). Collaborative Governance (dalam perpektif administrasi publik),: Semarang, Hal. 42.

Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif, Journal Bina Mulia Hukum. 4, 2-3.

Ross, Murray G., and B.W. Lappin. (1967). Community Organization: theory, Principles and practice. Second Edition. NewYork: Harper & Row Publishers.

Sondang P.siagian (2008), Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : bumi aksaraS

Sugiono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D, Bandung:Alfabeta

Sumampouw, Monique. (2004). Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif. Jacub Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.